

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (2015) mengemukakan pengertian pembangunan sebagai sebuah kegiatan yang terstruktur dan direncanakan dengan tujuan untuk menuju kondisi yang lebih baik yang melibatkan seluruh bagian dari suatu bangsa. Dalam kegiatan dan upaya ini, pembangunan menggunakan bermacam sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta optimal sehingga keberlanjutan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dijaga.

Konsep pembangunan suatu daerah salah satunya dilihat dari tingkat daya saing (Huda, 2014). Hal ini juga dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa peningkatan daya saing adalah salah satu hal yang harus dicapai dalam pembangunan daerah. Sejalan dengan itu Undang-Undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional periode 2015-2019 juga menyebutkan bahwa peningkatan daya saing dalam perekonomian baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam adalah tujuan dan target dalam pembangunan.

Banyak pendapat yang mencoba mengartikan daya saing, salah satunya adalah Simanjuntak (1992) dalam Feryanto (2010) dimana daya saing diartikan sebagai sebuah teori perbandingan yang memperlihatkan bagaimana kapasitas dan kemampuan dari suatu organisasi, lembaga, perusahaan, sektor ekonomi maupun negara dalam melakukan kegiatan produksi, penjualan dan penawaran produknya ke pasar. Penjelasan ini menunjukkan kemampuan dari produsen dalam kegiatan produksinya (barang/komoditas dan jasa) mampu menggunakan biaya yang minimal dan membuat harga menjadi lebih bersaing dan keuntungan di pasar internasional lebih meningkat.

Efisiensi dan keuntungan yang didapat dalam kegiatan produksi adalah dua hal yang dapat dipakai untuk menilai daya saing suatu komoditas. Efisiensi dilihat dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif komoditas tersebut, sedangkan keuntungan dilihat dari keuntungan privat dan sosialnya. (Sudaryanto, 1993) dalam (Jumiar,2013).

Berbicara daya saing juga terkait dengan keadaan suatu wilayah berupa wilayah kota dan desa karena hal ini akan berkaitan dengan kondisi Sumber daya manusianya. Pada wilayah perkotaan, sumber daya manusia yang ada cenderung lebih baik dari wilayah pedesaan hal ini disebabkan karena di perkotaan tersedia fasilitas pendukung mulai dari infrastruktur, pendidikan dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan perkotaan menjadi lebih kompetitif dengan daya saing yang tinggi, baik pada tingkatan nasional maupun internasional (Prasetyono, 2017).

Peningkatan daya saing dalam pembangunan kota merupakan langkah kota untuk bisa bersaing dengan kota lain. Kegiatan peningkatan daya saing ini akan dipadukan dan diselaraskan dengan kegiatan pembangunan kota secara keseluruhan baik dalam penguatan faktor internal maupun kegiatan pendorong pertumbuhan kota. Apabila ini berjalan dengan baik maka antar kota maupun wilayah lain akan terbangun keterkaitan yang tentu akan berguna untuk masing-masing wilayah (Santoso, 2009).

Amir (2003) menjelaskan bahwa daya saing komoditas termasuk komoditas pertanian bisa diukur dengan melihat kondisi pangsa pasar yang kemudian dibandingkan dengan kondisi pasar tetap dari komoditas tersebut. Selain itu terdapat dua hal yang mempengaruhi daya saing yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Kualitas, biaya produksi, harga jual, ketepatan waktu penyerahan, intensitas promosi, saluran pemasaran dan pelayanan dalam pemasaran adalah faktor yang langsung mempengaruhi daya saing suatu komoditas. Sedangkan sarana pendukung ekspor (perbankan, birokrasi pemerintah, bea cukai, dan lain-lain), insentif ekspor, tarif dan non tarif, tingkat efisiensi dan disiplin nasional, serta kondisi global adalah faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi daya saing komoditas.

Sektor pertanian adalah kegiatan yang dilakukan manusia dengan menggunakan makhluk hidup sehingga bisa memproduksi produk berupa barang pangan, sumber energi, bahan untuk keperluan kegiatan industri serta untuk pengelolaan lingkungan. Kegiatan pertanian ini bisa dilakukan di daerah perkotaan dan pedesaan. Kegiatan intra dan peri urban yaitu kegiatan pertanian di dalam serta pinggir kota adalah kegiatan pertanian di perkotaan. Kegiatan pertanian di perkotaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di kota, setelah

itu hasil produksi cenderung akan dijual dan didistribusikan di kota tersebut (Smith et al., 1996; dan FAO, 1999) dalam (Sampeliling et al. 2012).

Salah satu sektor pertanian adalah sub sektor hortikultura. Sub sektor hortikultura mampu memberikan perannya dalam pembangunan, karena dalam menyumbang kontribusi cukup besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2010 sampai 2014, tanaman hortikultura memiliki laju pertumbuhan sebesar rata-rata 3,60 % (Lampiran 1).

Kementrian Pertanian (2018) mengemukakan bahwa manggis merupakan salah satu komoditas hortikultura yang punya peluang ekspor (selain buah mangga, manggis, salak, nanas) dan menjadi sasaran pembangunan hortikultura ke depan adalah untuk mengembangkan komoditas hortikultura yang bernilai tambah dan berdaya saing. Manggis sendiri menempati urutan pertama dalam ekspor buah-buahan tahun 2015 (Lampiran 2).

Tanaman manggis dengan nama latin *Garcinia mangostana L* dikenal sebagai ratu dari buah karena rasa manis dan asam yang istimewa yang tidak ditemukan pada buah lain. Muslim dan Nurasa (2011) menyampaikan bahwa manggis sendiri memiliki peluang untuk dikembangkan karena melihat tingginya konsumsi di dalam negeri serta luar negeri yang diwujudkan dalam kegiatan ekspor. Selain sebagai bahan pangan manggis sendiri dapat berfungsi dalam kegiatan konservasi dimana manggis adalah tanaman berkayu yang bisa dan mampu tumbuh di areal perbukitan antara 350-700 mdpl (Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/OT.140/10/2006)

Peluang ekspor manggis membuat pemerintah Indonesia untuk melakukan pengembangan manggis itu sendiri. Akan tetapi era globalisasi membuat manggis Indonesia harus mampu bersaing dengan manggis lain di pasar lokal maupun dunia (Agustina, 2008). Sejalan dengan itu Kamaluddin (2006) menjelaskan adanya kebijakan dan upaya untuk mendorong dan meningkatkan ekspor terutama ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dari hasil ekspor, mendorong perkembangan industri dan daya saing barang ekspor, meningkatkan penghasilan produsen di bidang ekspor dan lain-lain yang bersangkutan dengan itu. Maka dari itu dilakukan pengurangan biaya transaksi maupun memperlancar arus barang dengan menghilangkan faktor penghambatnya.

Kebijakan Pemerintah dapat menjadi peluang dan tantangan dalam peningkatan daya saing manggis. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat hendaklah benar-benar diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi faktor pendorong bukan penghambat. Muslim dan Nurasa (2011) mengusulkan kondisi perdagangan, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif untuk diperhatikan pemerintah dalam membuat kebijakannya agar pendapatan petani serta devisa negara bisa meningkat, karna ketiga faktor tersebut memiliki sifat dinamis yang akan berubah seiring perubahan perekonomian, terutama keunggulan komparatif.

Kustiari, dkk (2012) berpendapat bahwa suatu kebijakan pemerintah bisa berefek baik dan berefek buruk serta dapat mempengaruhi jumlah produksi maupun produktivitas kegiatan ekonomi, bisa menaikkan maupun menurunkan. Maka dalam meningkatkan daya saing diperlukan sinergi dan keterpaduan antara intra, antara dan semua sektor sehingga pertanian dan industri manggis sendiri dapat berkembang dengan baik dan petani menjadi lebih sejahtera. Hal ini juga didukung oleh Sjafrizal (2012) yang menyebutkan bahwa pembangunan dan pengembangan masyarakat lokal adalah fokus utama dalam pembangunan, sehingga kesejahteraan merupakan sasaran utama pembangunan suatu daerah.

B. Masalah Penelitian

Kota Padang adalah ibukota provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 694,96 km² yang merupakan 1,65% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Empat puluh persen wilayah Kota Padang adalah wilayah efektif perkotaan sedangkan enam puluh persen lebih adalah daerah berbentuk perbukitan serta merupakan bagian dari hutan lindung. Dalam bidang pertanian, Kota Padang adalah wilayah yang dijadikan sebagai sentra pengembangan komoditas komoditas buah-buahan unggulan manggis (Lampiran 3).

Keunggulan wilayah Kota Padang ini turut didukung melalui SK Gubernur Sumatera Barat No:521/305/2013 tentang kawasan sentra produksi khususnya komoditas manggis sub sektor hortikultura di Sumatera Barat (Lampiran 4). Kemudian komoditas manggis di Kota Padang sudah dilakukan registrasi lahan usaha. Petani yang sudah mendapatkan registrasi lahan usaha berjumlah 62 orang

petani (Lampiran 5). Dengan pemberian nomor registrasi lahan hortikultura ini berarti kebun-kebun tersebut sudah memenuhi dan menerapkan sistem jaringan mutu. Dengan demikian diharapkan hasil produksi lahan yang telah diregistrasi akan memiliki pasar yang lebih luas dan sesuai dengan persyaratan dalam pasar global/internasional.

Produsen manggis yaitu petani manggis harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas. Khususnya petani manggis Kota Padang harus mampu bersaing dengan manggis kabupaten lain maupun dari daerah lainnya. Upaya yang bisa dilakukan harus komprehensif mulai dari teknis, ekonomi, sampai kepada sosial budaya (Martias, 2014).

Manggis di Kota Padang merupakan salah satu komoditas unggulan namun produksinya masih mengalami fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir (Lampiran 6). Pada tahun 2013 produksi manggis berjumlah 486 ton selanjutnya pada tahun 2014 produksi manggis di Kota Padang berjumlah 853 ton kemudian tahun 2015 produksi manggis meningkat berjumlah 2.324 ton, namun tahun berikutnya tahun 2016 produksi manggis turun drastis berjumlah 76 ton dan tahun 2017 produksi manggis meningkat lagi menjadi 1.986 ton. Pada saat produksi manggis meningkat harga manggis ditingkat produsen tidak dapat ditentukan oleh petani. Hal ini disebabkan karena ketergantungan petani terhadap pengumpul dan petani tidak tahu harus menjual panennya kepada siapa lagi, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah.

Di kota Padang, manggis ditanam hampir diseluruh wilayah, sebagai tanaman sambilan di pekarangan rumah hingga dalam bentuk kebun. Usahatani manggis di Kota Padang masih belum dikelola secara intensif baik bibit yang digunakan, teknologi budidaya, pemeliharaan panen maupun pasca panen (Hariance, 2016).

Selain itu sesuai dengan sifat produk pertanian daerah tropis yang berbuah sesuai dengan musimnya, maka manggis juga mengalami lonjakan produksi pada saat musim panen dan mengalami kekurangan produksi pada saat tidak musim panen. Kajian BPS dan Faperta UNILA dalam Laporan Peningkatan Kinerja Pertanian Menuju Kedaulatan Pangan tahun 2015 (BPS, 2015 dalam Hariance,

2016) disebutkan bahwa usahatani hortikultura belum dapat berkembang sesuai dengan potensinya karena beberapa kendala umum sebagai berikut : 1) usahatani masih berupa usaha sambilan yang belum dikelola dengan intensif, 2) teknologi yang digunakan masih terbelakang karena pada umumnya belum menggunakan varietas unggul, kualitas benih tidak baik, dan manajemen budidaya masih belum baik, 3) resiko produksi tinggi karena sensitif terhadap cekaman hama, penyakit dan iklim, 4) produktivitas dan mutu produk rendah 5) sistem pemasaran tidak efisien, 6) tekanan persaingan dari produk impor, 7) dukungan pemerintah masih kurang, khususnya dalam pembangunan infrastruktur pemasaran, penyuluhan dan penyediaan teknologi (benih unggul dan bermutu), perlindungan harga dan akses modal.

Kemudian Martias (2014), berpendapat bahwa permasalahan pada komoditas manggis yang menonjol adalah teknologi, harga, biaya input, produksi, kualitas, dan kontinuitasnya rendah, serta rentan terhadap penurunan kualitas dan ini akan mempengaruhi daya saing manggis baik lokal atau global. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani komoditas manggis ini mempengaruhi tingkat daya saing di daerah tersebut. Kemudian hal ini juga akan berimplikasi pada upaya pembangunan daerah tersebut, pembangunan pertanian, peningkatan pendapatan petani dan devisa. Hal ini dikarenakan ketika tingkat daya saing suatu daerah menurun maka akan menimbulkan dampak terhadap pendapatan usaha manggis yang berujung pada kerugian yang diterima oleh petani komoditas manggis. Maka kebijakan pemerintah berperan penting dalam peningkatan daya saing komoditas manggis. Penjelasan sebelumnya juga didukung oleh Sjafrizal (2012), yang menyebutkan bahwa keputusan dan ikut campur tangan pemerintah merupakan esensi dari kebijakan pembangunan wilayah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai sistem pengelompokan serta tarif bea masuk dan impor barang tersebut. Untuk komoditas manggis ditetapkan sebanyak lima persen untuk bea masuknya. Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan subsidi pupuk dan Harga Eceran Tertinggi untuk pupuk anorganik seperti Urea, SP-36, ZA, Petroganik dan NPK Phonska (Peraturan Menteri Pertanian no. 60/permentan/SR.310/12/2015)

Kebijakan pemerintah seperti halnya penerapan tarif impor, kuota dan subsidi input produksi (pupuk, peralatan usaha tani, obat-obatan) adalah salah satu faktor luar yang mempengaruhi perkembangan penguasaan komoditas manggis, input dan output serta dalam hal produktivitas dan harga output. Kebijakan yang bisa membuat biaya input berkurang dan meningkatkan nilai guna (harga) output inilah yang membentuk dan meningkatkan daya saing manggis.

Penjelasan diatas menjadi dasar dilakukannya penelitian “Analisis Daya Saing Komoditas Manggis di Kota Padang” untuk menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana daya saing komoditas manggis di Kota Padang?
2. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas Manggis di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis daya saing komoditas manggis di Kota Padang
2. Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas manggis di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan daya saing komoditas pertanian terutama daya saing komoditas manggis di lokasi penelitian ini.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang terkait meneliti permasalahan ini lebih lanjut dan bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau dasar dalam mengambil kebijakan mengenai daya saing manggis khususnya di Kota Padang.